



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN SURVEILANS SP DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTON DARYONO**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **271680**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m2/200 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **755.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU GRAN MAX MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. MOBIL, MAZDA BIANTE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU SIGRA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. MOTOR, YAMAHA BBP AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.225.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	86.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	432.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.000.000.000
Sub Total	Rp.	9.098.500.000
III. HUTANG	Rp.	1.575.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.523.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.